



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini merupakan cipta milik UIN Suska Riau

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM)
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DI KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

FATIMAH RAHMA NABILA

11720725264

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020/2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Dalam Pilkada 2020 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung”** yang ditulis oleh:

Nama : FATIMAH RAHMA NABILA

NIM : 11720725264

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

Hellen Last Fitriani, S.H, M.H
NIK. 130217 121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Peran Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Siak Nomor 17 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung"* yang ditulis oleh :

Nama : **FATIMAH RAHMA NABILA**
 NIM : 11720725264
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Basir, SHL, M.H

Penguji I
Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H

Penguji II
Rudiadi, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatimah Rahma Nabila

ABSTRAK

:Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung

“Badan Permusyawaratan Kampung atau biasa disebut BDP berwenang membahas rancangan peraturan kampung bersama Penghulu”. Pemerintah Desa atau Penghulu kampung sebagai pemimpin yang secara formal yang bertanggungjawab terhadap partisipasi masyarakat, salah satu diantaranya partisipasi politik masyarakat. Sebagian besar masyarakat banyak yang tidak mengerti bagaimana berpartisipasi politik dengan baik bahkan masyarakat tidak tahu apa pengertian dari politik itu karena pendidikan masyarakat tergolong relatif rendah. Dengan adanya BAPEKAM, dan mereka telah mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam partisipasi politik. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan apa saja faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dalam pengumpulan data, sifat penelitian ini adalah deskriptif dan jenis penelitiannya adalah kualitatif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, lokasi penelitian berada di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Pinang Sebatang Barat belum berjalan maksimal dimana masih banyaknya masyarakat yang belum berpartisipasi dalam hal politik di Kampung Pinang Sebatang Barat hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya (i) faktor ekonomi (ii) kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam menjalankan perannya; (iii) kurangnya kesadaran politik masyarakat.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintahan Desa, Partisipasi Politik



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung”**, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Muhammad Yani dan Ibunda Suharyatie yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta jajarannya yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN

Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum selaku sekretaris Jurusan beserta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Hellen Last Fitriani, S.H., M.H sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Azwar, S.E, M.Ec. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Saudara kandung penulis yang setia dan memotivasikan memberikan dukungan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kawan-kawan kelas Ilmu Hukum C dan HTN E, serta kawan-kawan seangkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman-teman kos Merah Putih yakni, Fristria Dini arianti, Gaby Mirza Islami dan Rahmah yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi dan menjadi keluarga.

11. Kepada Anika, Della, Firda dan Diana yang telah menemani saya dan memberikan motivasi untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi saya ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 25 Mei 2021

FATIMAH RAHMA N.

NIM.11720725264



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
C. Kerangka Teoritis	10
D. Tinjauan Terdahulu	15
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penelitian	24
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kampung Pinang Sebatang Barat	26
B. Keadaan Geografis	28
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

D. Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung	33
E. Kondisi Sosial Kampung Pinang Sebatang Barat	34
F. Visi dan Misi Kampung Pinang Sebatang Barat.....	34

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis Tentang Pengertian Negara Hukum.....	36
B. Tinjauan Teoritis Tentang Otonomi Daerah	38
C. Tinjauan Teoritis Tentang Demokrasi	41
D. Sistem Pemerintahan Desa	44
1. Badan Permusyawaratan Kampung	49
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Kampung	51
3. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Kampung	52
E. Pengertian Peran	54
F. Pengertian Partisipasi Politik	55

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung	59
B. Hambatan-Hambatan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung	65



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Daftar tabel Tinjauan Terdahulu	12
Daftar Data Informan	12
Keadaan Penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Mata Pencaharian Bulan Januari Tahun 2021	22
Keadaan Tingkat Pendidikan Di Kampung Pinang Sebatang Barat tahun Bulan Januari 2021	23

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Barat kecamatan Tualang Kabupaten Siak	25
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Barat kecamatan Tualang Kabupaten Siak	26



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan keleluasan dan juga peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Makna yang paling mendasar dari otonomi daerah itu adalah adanya kewenangan yang luas pada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam suatu wilayah yang terkecil dari suatu negara yang disebut desa.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Kampung atau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

biasa disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan desa adalah

“Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹ “ Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”

Dari hal tersebut diketahui bahwa BPD dikeluarkan dari unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ditambah dengan dikurangi peran legislasinya. Meski demikian, peran politik BPD diperkuat pada aspek pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa. Disamping itu, BPD dibebani tugas sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Desa yang merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa. Lembaga yang merupakan representasi warga desa ini adalah aktor politik desa yang menjalankan komunikasi politik dengan Pemerintahan Desa. Komunikasi politik yang dijalankan hendaknya diarahkan untuk memperkuat demokrasi Desa. Ini bisa

¹ UU No. 6 Tahun 2014



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dilakukan salah satunya adalah dengan mengadvokasi warga masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam hal politik Masyarakat atau kelompok masyarakat diperkenalkan dengan hal baru dalam konteks politik, yakni kebebasan menentukan sikap dan pendapat serta meniru demokrasi ala barat, dan demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas.

Menurut Kartasmita ada beberapa kendala lain yang pantas menjadi bahan pemikiran dan perlu dicari cara mengatasinya, antara lain: Pertama, merubah mentalitas aparatur di tingkat desa yang terbiasa bersikap sentralistik menuju mentalitas pemberdayaan daerah; Kedua, usulan-usulan tentang prioritas program pembangunan di desa yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Musbang di tingkat desa dan kecamatan sering terkesan hanya formalitas dan kurang diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten. Ketiga, jika otonomi desa benarbenar dapat diwujudkan, barangkali cukup menguntungkan bagi desa-desa yang memiliki aset dan sumber daya alam yang memadai, namun justru mempersulit untuk desa-desa yang kurang strategis dalam masalah sumber daya alam dan tidak memiliki aset yang cukup.

Seperti yang tercantum dalam UU No. 12 tahun 2008 bahwa “BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Pemerintah Desa sebagai pemimpin yang secara formal yang bertanggungjawab terhadap partisipasi masyarakat, salah satu diantara partisipasi politik masyarakat. Pemerintahan desa yang lebih mengetahui mengenai bagaimana keadaan partisipasi politik masyarakat di desa tersebut dan bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berguna dalam keberhasilan pembangunan desa. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salahsatu indikator penting. Pentingnya partisipasi politik masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajiban individu atau kelompok sebagai warga negara dalam menggunakan segala sumber daya sosialnya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pemerintah.

Kegiatan partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksud misalnya membujuk atau Untuk melibatkan masyarakat desa dalam kehidupan politik atau dengan kata lain berpartisipasi dalam politik bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat, tetapi membutuhkan usaha yang cukup berat dan waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena tidak berpengaruhnya kehidupan politik dalam pemerintahan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Masyarakat desa menganggap bahwa politik hanya pekerjaan para pejabat-pejabat Negara yang tidak ada gunanya bagi mereka. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaruh atau perubahan yang terjadi pada masyarakat desa yang lebih baik walaupun masyarakat desa sudah berpartisipasi dalam politik. Selain itu masyarakat desa beranggapan bahwa politik hanya untuk orang-orang yang berkedudukan tinggi sedangkan rakyat biasa hanya dijadikan korban yang tidak tahu apa-apa. Maka untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif pada masyarakat



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tersebut, perlu pendekatan dan penyuluhan yang berguna agar pikiran mereka tidak berprasangka negatif terhadap pemerintah dalam kehidupan politik dan agar masyarakat desa lebih tertarik dan berminat untuk berpartisipasi dalam politik sehingga dapat memberi kemajuan kepada desa yang mereka tempati.

Oleh sebab itu, aparatur pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam menjalankan pemerintahan di desa yang bertugas memberikan keterangan dan pengetahuan tentang politik dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat desa tidak buta sepenuhnya mengenai kehidupan politik di negara kita.

Dalam Peraturan Daerah Siak Nomor 17 tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Kampung pasal 3 fungsi Badan Permasyarakatan Kampung sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung dan Peraturan Kampung bersama Penghulu
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Penghulu²

Pasal 56 ayat (1) Anggota Badan Permasyarakatan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannyadilakukan secara demokratis. (2) Masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

² Perda Siak No. 17 tahun 2018



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pimpinan BPD terdiri dari atas 1 (satu) orang sekretaris. Ketentuan tersebut termasuk dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BAPEKAM atau BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan lembaga pengawas Desa yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat desa. Karena melalui BPD masyarakat desa dapat mengeluarkan segala aspirasi dan keluhan mereka. BPD menampung dan menggali aspirasi masyarakat kemudian melakukan seleksi terhadap aspirasi dan menyalurkan aspirasi atau keluhan masyarakat desa tersebut kepada Kepala Desa atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti, Badan Permusyawaratan Kampung telah beberapa kali melaksanakan Musyawarah yang membahas perihal politik akan tetapi masih banyak masyarakat Kampung Pinang Sebatang Barat yang tidak mengerti soal politik dan masih banyak dari mereka yang tidak mau ikut andil di dalam dunia perpolitikan misalnya golput dalam pemilu, tidak ikut rapat yang diadakan oleh Pemerintahan Desa dll.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**



B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah harus diperhatikan agar masalah dalam penelitian ini nyata adanya dan menjelaskan masalah yang timbul merupakan masalah dari latar belakang penelitian ini bukan masalah yang timbul tanpa induk. Identifikasi masalah merupakan sebuah konsep dasar untuk melakukan penelitian, dengan adanya identifikasi masalah akan dapat mengarahkan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

Dalam penelitian ini masalah yang harus diidentifikasi yaitu :

1. Peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam meningkatkan partisipasi politik di Desa Pinang Sebatang Barat.
2. Keterlibatan masyarakat Desa Pinang Sebatang Barat dalam berpartisipasi politik.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta , maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis membatasi terhadap Pelaksanaan kewajiban Badan Permusyawaratan Kampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan Pilkada 9 Desember 2020 di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

merupakan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Ditaring memengip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum tentang isi karya tulis yang dikutip.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Tu*

2) *Tu*

- ## Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Dalam Pilkada 2020 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
- 2) Untuk Mengetahui Hambatan Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Dalam Pilkada 2020 Berdasarkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Dalam Pilkada 2020 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat.
- 2) Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.
- 3) Berguna bagi para praktisi terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

c. Secara Akademis

- 1) Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana.
- 2) Sebagai referensi dalam literatur kepustakaan pada perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting dalam menyusun karya ilmiah, karena didalam kerangka teori akan dimuat teori - teori yang relevan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori sebagai landasan berpikir atau titik tolak dalam penelitian. Oleh sebab itu perlu disusun yang namanya kerangka teori yang memuat pokok - pokok pikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian itu akan ditelaah.³

Teori merupakan sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling kait - mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukan secara spesifik hubungan - hubungan di antara variabel - variabel yang terkait dalam fenomena, dengan tujuan memberikan eksplansi atau penjelasan serta prediksi atas fenomena tersebut .

Berikut ini akan dijabarkan beberapa teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

A. Teori Negara Hukum

Negara Hukum atau dikenal dengan istilah *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan kesadaran hukum yang terdapat pada rakyat. Dari latarbelakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Deskriptif, I* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), h. 39-40.



pada satu sasaran yaitu pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.⁴

Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. Selama kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi pengabsahan republik konstitusional, tetapi banyak diantara simbol-simbolnya secara konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur dan berbagai kitab undang-undang hukum Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan. Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam dibawah tekanan petrimonialisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan substantif dari pada keadilan proseduler. Dengan lainnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikata lebih optimistis.⁵

B. Teori Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos* dalam bahasa Yunani yang artinya *Autos* sendiri dan *nomos* yang berarti aturan atau Undang-Undang, sehingga dapat diartikan bahwa otonomi adalah kewenangan dalam mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah

⁴ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 81.

⁵ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 384-385.



tangganya sendiri. Sedangkan daerah berarti suatu masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayahnya masing-masing.⁶

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pemberian kewenangan yang lebih luas dalam hal administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah telah dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah yang dicanangkan sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping itu juga menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.⁷

C. Teori Demokrasi

Dari sudut pandang etimologi Demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan cretain (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah. Menurut tafsir R. Krenenburg, bahwa perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#cite_note-1 diakses pada tanggal 9 Maret 2021

⁷ Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 217-219.



Sementara itu, dalam kamus Dictionary Websters, bahwa demokrasi adalah

pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan umum yang bebas.

Menurut Affan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut ;

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul berserikat dan lain-lain.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teori Peran

Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Lain halnya dengan R. Linton berpendapat bahwa, peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. Sementara Menurut Poerwadarminta (1998: 735) menyatakan bahwa: “Peranan adalah segala sesuatu yang menjadi atau yang memegang yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa”⁸

Berbeda dengan King berpendapat bahwa, peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial. Sementara menurut Palan, peran adalah merujuk pada hal yang harus dijalankan seseorang di dalam sebuah tim.

Hal berbeda dikemukakan oleh Alo Liliweri yang berpendapat bahwa, peran adalah sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi atau kedudukan. Sama halnya dengan Paula J. Christensen & Janet W. Kenney berpendapat bahwa, peran adalah pola perilaku yang ditetapkan saat anggota keluarga berinteraksi dengan anggota lainnya.

E. Pengertian Partisipasi Politik

Definisi menurut Syafi'i Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam

⁸ Heri Kusmanto, *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.”

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau tindakan-tindakan yang diambil mereka. Sedangkan Pemilih pemula itu sendiri ialah pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden-Wakil Presiden.⁹

G. Tinjauan Karya Terdahulu

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaituperan bapekam dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Telah ada beberapa literatur yang membahas terkait masalah tersebut, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini begitu pula dengan penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang di maksud diantaranya adalah sebagai berikut ;

⁹ Andi Faisal Bakti dkk, *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta: Churia Press, 2012), h. 127.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Mahasiswa Islam UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.1

Tabel Literatur Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Ikbal Hidayat	Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo (2018)	Kualitatif	Pada skripsi ini hanya membahas peran aktif dan tanggungjawab dalam menjalankan musyawarah desa sudah berjalan dengan baik, namun tidak semua anggota berperan aktif dalam memberikan ide-ide dan inovasi dalam musyawarah desa, hanya sebagian orang yang menjadi ujung tombak dalam keaktifan BPD.
2	Gandi Al Fajri	Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan	Kualitatif	Pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa di Desa Batu Sasak tidak terlaksana diantaranya; (i) Badan Permasyarakatan Desa tidak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Permusyawaratan
Desa Di Desa
Batusasak
Kecamatan Kampar
Kiri Hulu Kabupaten
Kampar (2020)

ikut menyepakati Peraturan Desa bersama kepala Desa; (ii) Badan Permusyawaratan Desa tidak menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; (iii) Badan Permusyawaratan Desa tidak mengawasi kinerja Kepala Desa. Faktor penghambatnya adalah (i) pola komunikasi yang tidak berjalan, (ii) kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya, (iii) kurang sarana dan prasarana, serta (iv) masyarakat kurang memahami fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

3.

Dian
Haryani

Peran Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD) Dalam
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan

Kualitatif

Penelitian Ini Meneliti Tentang Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian Ini Bertujuan



Desa Di Desa Melati
 II Kecamatan
 Perbaungan
 Kabupaten Serdang
 Bedagai (2015)

Untuk Mengetahui Bagaimana
 Peran Badan Permusyawaratan
 Desa Dalam Pengawasan
 Penyelenggaraan Pemerintahan
 Desa.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian atau *Methodology of research* berasal dari kata *metoda* yang berarti cara atau teknik dan *logos* yang berarti ilmu. Sehingga metodologi penelitian berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian.¹⁰ Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan, disini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis yang digunakan.

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

¹⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012), h. 11.



1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹¹

Penelitian ini adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti¹²

Pada dasarnya jumlah informan atau narasumber tidak dibatasi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kelengkapan data. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive artinya narasumber akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.¹³ Lokasi penelitian ini adalah Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

¹¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Rosdakarya, 2000), h. 9.

¹² Sukandarumidi, *Dasar-Dasar Pembelajaran*, (Surabaya : Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 65.

¹³ Lexy Moleong, *op.,cit.* h. 20.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan Purposive dengan subyek dalam penelitian berjumlah sebanyak 16 (duapuluh enam) orang yang terdiri dari ;

1. Kepala Desa
2. Ketua BAPEKAM
3. Sekretaris BAPEKAM
4. Tokoh Masyarakat
5. Masyarakat

Untuk lebih jelasnya perincian informan kunci dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 1.2

Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tingkat Pendidikan	Status Sosial
1	Herman	Laki-laki	46	S1	Kepala Desa
2	Suhaimi	Laki-laki	50	S1	Ketua BAPEKAM
3	Supri	Laki-laki	29	SLTA	Sekretaris BAPEKAM
4	Suprpto	Laki-laki	48	SLTA	Tokoh Masyarakat
5	Muhammad	Laki-laki	51	SLTA	Tokoh



	Rahman				Masyarakat
6	Seasuren	Laki-laki	53	SLTA	Tokoh Masyarakat

Sumber: Data Lapangan 2021

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dari Ketua Badan Permusyawaratan kampung (Bapekam) sebanyak 1 orang, Kepala Desa sebanyak 1 orang serta masyarakat Kampung Pinang Sebatang Barat sebanyak 20 orang. Untuk sampel anggota Badan Permusyawaratan kampung (Bapekam) dan perangkat Desa, penulis menggunakan teknik sensus yaitu mengambil jumlah secara keseluruhan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari lokasi penelitian Badan Permusyawaratan Kampung melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Kampung yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kemudian jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan buku-buku yang berisi tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi/Pengamatan, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati gejala yang diteliti guna mendapatkan data yang dibutuhkan.¹⁴ Dalam hal ini penulis mengamati pelaksanaan Bapekam dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah masyarakat di Desa Pinang Sebatang Barat.
- 3) Dokumentasi yaitu mendapatkan fakta-fakta penting dan tepat yang berkaitan dengan masalah-masalah. dokumen-dokumen dapat berupa catatan maupun data-data yang mendukung kajian ini untuk menjadi penguat penelitian.¹⁵

6. Metode Analisis Data

¹⁴ Ibid, h. 70.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *op. cit.*, h. 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik analisa data dalam penelitian yaitu dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui pendekatan kualitatif yaitu setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisa dengan data yang telah terkumpul. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang terkumpul dengan bentuk karangan secara deskriptif analisis. Penyajian deskriptif analisis yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek tertentu yang tersangkut paut dengan masalah dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan kebenaran dan berusaha memahami kebenaran tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik menarik kesimpulan berhubungan dengan penalaran, yaitu suatu proses berpikir untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada sehingga diperoleh satu kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yakni kesimpulan yang disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas. Teknik deduktif adalah teknik menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada fakta umum sebagai inti permasalahan kemudian diperjelas dengan gagasan-gagasan khusus yang relevan dengan fakta umum.



1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang lokasi penelitian, dan mencoba menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian. Seperti sejarah singkat kampung pinang sebatang barat, demografis dan geografis kampung pinang sebatang barat, kehidupan beragama, pendidikan dan sosial ekonomi.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan Negara, Demokrasi, Otonomi Daerah, Sistem Pilkada, Badan Permusyawaratan Kampung, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dan teori yang digunakan untuk membahas tentang peningkatan partisipasi politik masyarakat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hasil cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**: PENUTUP**

Barat Dalam Pilkada 2020 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung serta Faktor – Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Dalam Pilkada 2020 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Penutup berisi tentang Peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang belum berjalan maksimal dimana masih banyaknya masyarakat yang belum berpartisipasi dalam hal politik di Kampung Pinang Sebatang Barat hal ini disebabkan karena adanya beberapa factor yang menjadi penghambat diantaranya (i) faktor ekonomi (ii) kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam menjalankan perannya; (iii) kurangnya kesadaran politik masyarakat

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kampung Pinang Sebatang Barat

Pada awal terbentuknya Kampung Pinang Sebatang Barat sebagai institusi yang berperan menjalankan roda Pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis, merupakan bentuk suatu Desa yang bermanfaat mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih mendekat antara Pemerintahan dengan rakyat yang diperintahnya.

Sejarah berdiri Desa Pinang Sebatang Barat merupakan pemekaran dari Desa Pinang Sebatang pada Tahun 2002. Desa ini tak lepas dari perjuangan dan aspirasi tokoh masyarakat Desa Pinang Sebatang. Tahun 2015 Desa Pinang Sebatang Barat berubah nama menjadi Kampung Pinang Sebatang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1). Kampung Pinang Sebatang Barat yang posisi wilayahnya yang menyebar kurang lebih jaraknya 12 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tualang yang dapat ditempuh melalui darat.

Kampung Pinang Sebatang Barat merupakan Kampung yang memiliki 3 (Tiga) kewilayahan terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu Dusun Suka Jaya, Dusun Suka Jadi dan Dusun Suka Melati. Dari ke 3 (Tiga) Dusun tersebut terdiri dari 5



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(Lima) Rukun Kampung (RK) dan 18 (Delapan Belas) Rukun Tetangga (RT).

Tujuan dari pemekaran Kampung ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan birokrasi.

Dengan demikian, potensi yang ada di Kampung Pinang Sebatang Barat ini secara tidak langsung terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan kampung yang lama sebelum otonomi Daerah ditetapkan.

B. Keadaan Geografiis

Kampung Pinang Sebatang Barat yang posisi wilayahnya yang menyebar, yang kurang lebih jaraknya 6 KM dari pusat Pemerintahan Kecamatan Tualang yang dapat ditempuh melalui darat. Kampung Pinang Sebatang Barat merupakan salah satu Kampung dari 8 Kampung 1 Kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana di mekarkan menjadi 3 Kampung berdasarkn perda Siak Nomor 38 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Kampung Pinang Sebatang Barat ini dibagi kedalam tiga dusun yaitu : Dusun Sukajadi, Dusun Suka Melati, dan Dusun Sukajaya serta terdiri dari 5 Rukun Kampung (RK) dan 18 Rukun Tetangga (RT). Tujuan dari pemekaran ini dalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan Kampung.

Luas wilayah Kampung Pinang Sebatang Barat 42,48 Km² dengan batas wilayah, yakni :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sungai Selodang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Pinang Sebatang Timur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pinang Sebatang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Perawang Barat

1. Keadaan atau Gambaran Umum Demografis Penduduk

Penduduk yang berdomisili di Kampung Pinang Sebatang Barat adalah etnis Melayu. Bahasa dan adat istiadat masyarakat Kampung Pinang Sebatang Barat umumnya bahasa Melayu. Kesenian masyarakat Kampung Pinang Sebatang Barat yakni Silat Pangean yang sudah membudidaya secara turun-temurun semenjak puluhan tahun yang lalu dan kegiatan Kerohanian atau keagamaan yaitu Suluq, kedua kegiatan tersebut setiap tahunnya dilaksanakan.

Dari data yang disajikan di tahun 2021 awal Kampung Pinang Sebatang Barat jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan adalah **5.243** jiwa, dengan perincian jumlah penduduk jenis kelamin **laki-laki 2.694** orang dan **perempuan 2.551** orang, serta jumlah Kepala Keluarga Kampung Pinang Sebatang Barat sebanyak **1.540 KK**.

2. Keadaan Ekonomi Kampung Pinang Sebatang Barat

Mata pencaharian penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak di tahun 2020 juga tidak berbeda dengan penduduk di kampung-kampung lainnya yang ada dalam wilayah Kecamatan Tualang. Umumnya penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berprofesi sebagai petani, buruh dan pedagang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun jumlahnya tidak banyak. Sedangkan profesi lainnya yaitu sebagai pedagang warung keperluan sehari – hari dan pedagang makanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Keadaan Penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Mata Pencaharian Bulan Januari Tahun 2021

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	10	0,19 %
2	Abri / Polri	0	0,00 %
3	Swasta	3.055	58,48 %
4	Buruh	191	3,73 %
5	Petani	340	6,55 %
6	Nelayan	4	0,07 %
7	Tidak Bekerja	1.625	31 %
Jumlah		5.225	100 %

Sumber : Laporan Penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat Tahun 2021

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan Masyarakat Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang tertinggi bekerja sebagai Swasta berjumlah 3.055 Jiwa disusul dengan masyarakat yang tidak bekerja dengan jumlah 1.625 Jiwa dan paling sedikit bekerja sebagai Nelayan berjumlah 4 jiwa.



3. Klasifikasi penduduk menurut Agama

Mayoritas masyarakat Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Pada tahun 2020 beragama Islam dengan jumlah 4.567 jiwa kemudian terbanyak kedua masyarakat yang beragama Protestan berjumlah 494 jiwa, yang beragama Khatolik berjumlah 125 jiwa, dan yang masih tetap jumlah jiwa dari tahun 2019-2020 beragama Hindu berjumlah 25 jiwa dan terendah agama Budha 14 jiwa.

4. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan dalam suatu masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat vital, karna pendidikan suatu penduduk ikut serta menentukan maju mundurnya suatu daerah. Adapaun pendidikan yang terdapat di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

**Keadaan Tingkat Pendidikan Di Kampung Pinang Sebatang Barat tahun
Bulan Januari 2021**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sekolah Dasar (SD)	1.163	22,17 %
2	SMP Sederajat	818	15,75 %
3	SMA Sederajat	1.463	28 %
4	Akademi	61	1,21 %
5	Sarjana / S1	25	0,51 %



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Tidak Tamat SD	66	1,29 %
7	Tidak Tamat SMP	72	1,37 %
8	Tidak Tamat SMA	55	1 %
9	Tidak Sekolah	1.502	28,90 %
Jumlah		5.225	100 %

Sumber : Laporan Penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat Tahun 2021

Keadaan tingkat pendidikan dari tabel dapat dilihat bahwa pendidikan masyarakat pada Kampung Pinang Sebatang Barat sesuai yang terdata di laporan penduduk Kmpung Pinang Sebatang Barat tahun 2020 relatif meningkat dibandingkan 2 tahun terakhir dimana lulusan tingkat SD, SMP, SMA, Akademi dan Sarjana sudah mulai meningkat meskipun yang tidak bersekolah tersebut masih banyak berjumlah 1.507 jiwa, tapi masalah tersebut tahun ketahun – tahun akan di prioritaskan masalah pendidikan ini.

C. Stuktur Organisasi Pemerintahan Kampung

Kampung atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia (peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Kampung). Pemerintahan Kampung terdiri dari Penghulu Kampung dan perangkat kampung. Perangkat kampung terdiri dari Kerani (sekretaris Kampung), Juru Tulis, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

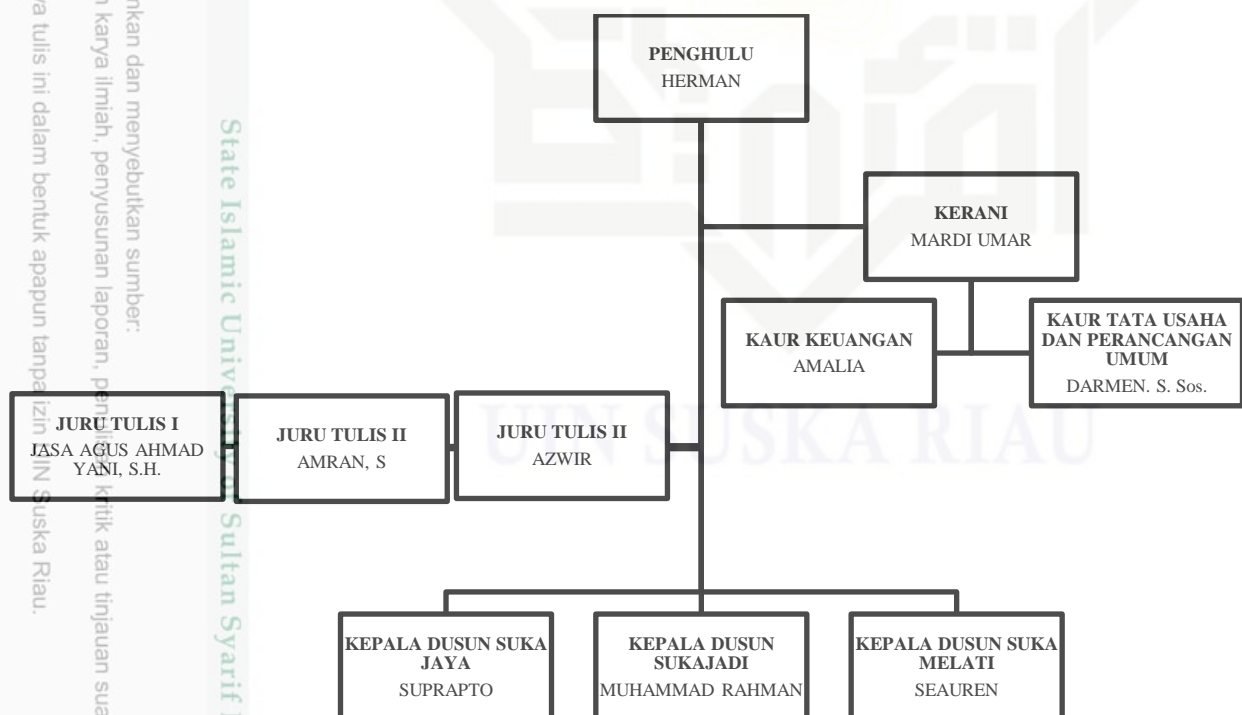
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan Penghulu Kampung sebagai kepala pemerintahan di kampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan

Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Kepala kampung atau disebut Penghulu yang dibantu oleh sejumlah perangkat Kampung, yaitu : (i) Kepala Kampung, (ii) Kerani, (iii) Juru Tulis, (iv) Kepala Urusan dan (v) Kepala Dusun

Gambar 2. 1

**Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Barat
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**



Sumber: Kantor Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Barat 2021

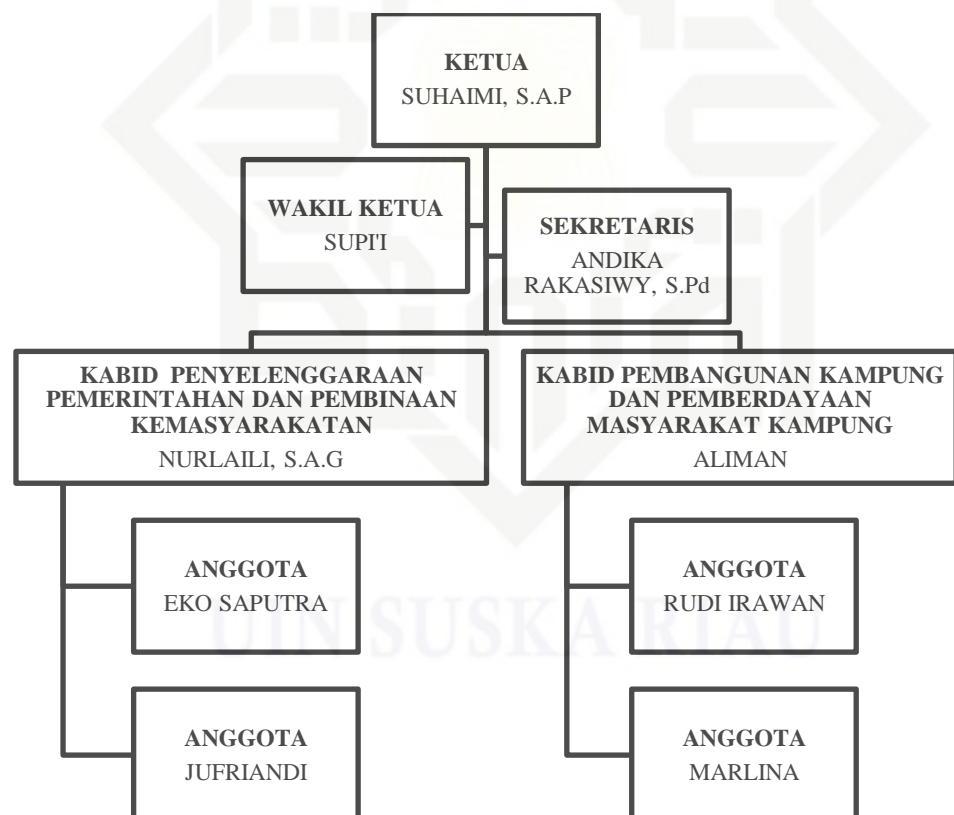


D. Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan empat orang anggota :

Gambar 2. 2

Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak



Sumber : Kantor Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung Pinang Sebatang Barat

2021



E. Kondisi Sosial Kampung Pinang Sebatang Barat

Penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Suku Melayu Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kampung Pinang Sebatang Barat dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Kampung Pinang Sebatang Barat memiliki sarana prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan sosial.

F. Visi Dan Misi Kampung Pinang Sebatang Barat

1. Visi

Visi Kampung Pinang Sebatang Barat tahun 2015-2021 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Kampung Pinang Sebatang Barat yang mandiri, sejahtera, dan berkualitas dalam tatanan masyarakat yang agamis dan budaya melayu”

2. Misi

Misi Kampung Pinang Sebatang Barat adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang partisipatif, transparan, akuntabel, dinamis yang dibangun dengan kebersamaan.
2. Meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan kampung dan lembaga kemasyarakatan.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan baik formal maupun informal.
4. Menyiapkan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan agama.
5. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam semua aspek pembangunan.
6. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat dengan pengelolaan intensifikasi.
7. Meningkatkan infrastruktur kampung yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pembangunan pembukaan jalan baru, peningkatan status jalan, penataan ruang dan perumahan.
8. Menanggulangi tingkat kemiskinan melalui program ekonomi kerakyatan dan meningkatkan ekonomi kampung.
9. Meningkatkan alur penyusunan administrasi dan tata kelola dokumen kampung.
10. Mengembangkan teknologi tepat guna dan tepat sasaran.
11. Melestarikan serta menjaga nilai-nilai budaya melayu melalui kelembagaan adat melayu, kesenian tradisional, permainan tradisional serta penerapan adat istiadat melayu

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

F. Tinjauan Teoritis Tentang Pengertian Negara Hukum

Negara Hukum atau dikenal dengan istilah *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan kesadaran hukum yang terdapat pada rakyat. Dari latarbelakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan diri pada satu sasaran yaitu pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.¹⁶

Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. Selama kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi pengabsahan republik konstitusional, tetapi banyak diantara simbol-simbolnya secara konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur dan berbagai kitab undang-undang hukum Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan. Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam dibawah tekanan petrimonialisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan substantif dari pada keadilan proseduler. Dengan

¹⁶ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 81.



2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lainnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikata lebih optimistis.¹⁷

Indonesia adalah negara hukum, penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut : *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.

Dalam Negara Hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *'the Rule of Law, and not of Man'*, yang sejalan dengan pengertian *'nomocratie'*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *'nomos'*. Dalam paham Negara Hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah

¹⁷ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 384-385.



2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang bekedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).¹⁸

G. Tinjauan Teoritis Tentang Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata autos dan namos dalam bahasa Yunani yang artinya Autos sendiri dan namos yang berarti aturan atau Undang-Undang, sehingga dapat diartikan bahwa otonomi adalah kewenangan dalam mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tanganya sendiri. Sedangkan daerah berarti suatu masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayahnya masing-masing.¹⁹

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari

¹⁸ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), h. 61-62.
¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#cite_note-1 diakses pada tanggal 9 Maret 2021



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pemberian kewenangan yang lebih luas dalam hal administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah telah dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah yang dicanangkan sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping itu juga menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.²⁰

Otonomi daerah mempunyai visi yang mencakup tiga bagian interaksi utama, yang pertama yaitu dalam politik, dimana otonomi daerah merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, merupakan proses lahirnya kepala pemerintahan daerah dengan cara dipilih langsung oleh masyarakat secara demokratis. Kedua yaitu dalam bidang sosial dan budaya, dimana dalam menjalankan otonomi daerah harus sebaik mungkin untuk menciptakan keserasian sosial dan merawat serta menjaga nilai-nilai lokal yang dapat memberikan peluang terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon kehidupan di sekitarnya. Ketiga yaitu dalam bidang ekonomi, otonomi daerah memberikan peluang untuk pemerintah daerah dalam memajukan potensi ekonomi di daerahnya sendiri.²¹

²⁰ Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negar Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 217-219.

²¹ H. Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung.: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 32-33.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyelenggaraan pemerintah tercermin semangat otonomi daerah dalam praktiknya yang dasarnya pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dalam mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kesanggupan sumber daya yang ada. Otonomi daerah juga bukan hanya dititikberatkan pada pendapatan asli daerah, tetapi pemberdayaan masyarakat pun sangat diperlukan dengan berusaha menyesuaikan pendekatan kultural dan struktural agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah. Inilah hakikat otonomi sesuai dengan keinginan rakyat.²²

Tujuan dari otonomi daerah adalah :

- a) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b) Pengembangan kehidupan demokrasi;
- c) Perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah
- d) Pengembangan kehidupan demokrasi;
- e) Distribusi pelayanan publik.²³

Secara prinsipiell, terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk memanajemeni daerah dan tanggungjawab terhadap kegagalan dalam memanajemeni daerahnya. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif megatur daerah.²⁴

²² H. Utang Rosidin, *op. cit.*, h. 32-33.

²³ Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah : Upaya Mengatasi Kegagalan*, (Jakarta Selatan: Kata Hasta Pustaka, 2012), h. 88-99.

²⁴ H.A.W. Widjadja, *op.cit.*, h. 7.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

H. Tinjauan Teoritis Tentang Demokrasi

Dari sudut pandang etimologi Demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan cretain (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah. Menurut tafsir R. Krenenburg, bahwa perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.

Sementara itu, dalam kamus Dictionary Websters, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih daibawah sistem pemilihan umum yang bebas.²⁵

Menurut Affan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut ;

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;

²⁵ Deddy Ismatullah, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung : CV. Pustaka Media, 2016), h. 75.



2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan

6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul berserikat dan lain-lain.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu :

1. Pemerintah yang bertanggungjawab;
2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan²⁶

Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik disetiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu :

²⁶ Rahman Yasir, *Gagasan Islam tentang Demokrasi*, (Yogyakarta : AKA Group, 2006),



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
2. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara
6. Terdapat berbagai sumber informasi;
7. Ada pemilihan yang bebas, jujur dan adil;
8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cermin demokrasi, antara lain:

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul)
2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat)
3. Hak memilih dan dipilih
4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik
5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan
6. Pemilu yang bebas dan adil



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.²⁷

I. Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah Seluruh alat perlengkapan Negara atau kelembagaan kenegaraan yang fungsinya sebagai alat yang mewujudkan tercapainya tujuan negara. Menurut boediningsih (2010:1) pemerintah dalam arti luas menurut ajaran Montesquieu dalam trias politican meliputi tiga kekuasaan, (1) pembentukan undang-undang; (2) pelaksanaan; (3) peradilan. Sedangkan pemerintah dalam artian lebih sempit adalah hanya badan pelaksana (eksekutif) saja.²⁸

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok, Secara umum tugas-tugas umum pokok pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala bentuk .kemungkinan serangan luar dan .menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam menggulingkan pemerintahan yang sah .melalui cara-cara .kekerasan yang ada.
2. Memelihara ketertiban dengan .mencegah terjadinya keributan dan tindak laku kekerasan antara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil pada setiap warga .masyarakat tanpa .membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

²⁷ Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung : CV Armico, 2002), h. 251.

²⁸ Talidizuhu Ndraha, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melakukan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menggantungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Di jelaskan dalam peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 5 tahun 2015 dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan an di kampung kerjasama antara pemerintah Kampung serta badan permusyawaratan kampung sangat dibutuhkan demi mengurus serta menjawab aspirasi masyarakat kampung dengan melihat asal usul serta Norma adat istiadat serta diakui dalam jam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung:

1. Faktor Filosofis

Secara Filosofis, untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali budaya lama yaitu budaya Melayu Siak. Dengan cara perubahan nama Desa menjadi Kampung ini diharapkan masyarakat sedikit bisa merasakan bagaimana kehidupan dimasa lalu, bagaimana usaha yang dilakukan para pahlawan khususnya dari Kerajaan Siak. Kabupaten Siak juga pada masa dahulu tidak langsung seperti saat ini, masyarakat sudah banyak hidup sejahtera dengan peninggalan, kekayaan alam ataupun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan budaya orang-orang terdahulu. Jadi diharapkan dengan adanya perubahan nama Desa menjadi Kampung ini bisa memberikan kita gambaran dan suatu pembelajaran bagaimana kehidupan di masa Kabupaten Siak belum berkembang seperti sekarang ini.

2. Faktor Sosiologis

Secara Sosiologis, untuk mengubah paradigma masyarakat ataupun manusia bahwa Kampung itu bukanlah suatu daerah yang terkebelakangan atau tertinggal. Karena Kabupaten Siak sendiri merupakan salah satu daerah dengan pusat pembangunan terbesar, dan salah satu penghasil minyak bumi terbesar untuk Indonesia, khususnya di Riau.

3. Faktor Yuridis

Hal lainnya yang mempengaruhi mengenai Urgensi dari Peralihan penamaan Desa Menjadi Kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung ini adalah Faktor Yuridis, dimana perubahan ini merupakan amanat yang tertuang didalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana adanya kearifan lokal terhadap nilai-nilai budaya daerah. Hal ini sesuai yang telah dijelaskan didalam Penjelasan atas Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang penamaan Desa menjadi Kampung, sebagaimana di maksud perubahan penamaan Desa menjadi Kampung di Kabupaten Siak. Penamaan ini bertujuan untuk mengembalikan penataan ulang dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Melayu, penamaan Desa diubah kembali menjadi Kampung seperti mana yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak.

Sebagai lembaga yang merupakan mitra kerja pemerintahan kampung menjadi salah satu fungsi badan permusyawaratan kampung di mana badan permusyawaratan kampung bersama pemerintahan kampung bersama-sama bersinergi di bidang pemerintahan pembangunan di kampung itu sendiri serta berfungsi di bidang kemasyarakatan dimana BAPEKAM sebagaimana badan yang mengurus dibagian legislasi pemerintahan Kampung serta menjadi badan yang melakukan pengawasan atas kinerja pemerintahan Kampung serta menjadi badan Yang menaungi dalam menampung dan menyalurkan segala bentuk aspirasi masyarakat Kampung serta mampu memilih skala prioritas apa saja yang harus diutamakan demi mewujudkan aspirasi masyarakat kampung itu sendiri peraturan daerah dalam setiap kabupaten di sini terkait badan permusyawaratan Kampung diterbitkan oleh Bupati selaku kepala pemerintahan di tingkat kabupaten.

Dalam hal Kampung, The Liang Gie (1982:25) mengartikan bahwa tata pemerintahan Kampung adalah tradisi suatu lembaga dalam menjalankan suatu pemerintahan yang ada di suatu Kampung (Pemerintahan kampung dan BAPEKAM), termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Proses pemerintahan dalam sebuah kampung dipilih, dipantau, dan digantikan,
2. Kapasitas pemerintahan kampung guna merancang dan melaksanakan kebijakan secara efektif.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Dapat dilihat bahwa dalam tatanan pemerintahan kampung tidak hanya sebatas menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. namun yang sangat terpenting di dalamnya nya masyarakat Kampung dapat menyalurkan keaktifannya dalam memberikan partisipasi dan mengontrol pemerintahan Kampung Dalam menjalankan wewenang tersebut dengan bertanggung jawab dan baik.



1.

Badan Permusyawaratan Kampung

Abdullah (2007:171) mendefinisikan “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”

Wasistiono dan Tahir (2007:35) juga mendefinisikan bahwa Badan Perwakilan Kampung (BAPEKAM) yang ada selama ini berubah menjadi Badan Permusyawaratan Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung berfungsi menetapkan peraturan kampung bersama Penghulu Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut BAPEKAM yang juga sebagai wakil dari masyarakat merupakan penyambung bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya kepada Penghulu Kampung.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung, bahwa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

Badan Permusyawaratan Kampung untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah masing masing yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah yang ada di suatu kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten /kota bersama Bupati/Walikota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Kampung yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat kampung, serta menetapkan peraturan Kampung bersama Penghulu Kampung harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat di dalam suatu kampung merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BAPEKAM. Kinerja pemerintah kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan Kampung diawasi oleh BAPEKAM sebagaimana salah satu fungsi BAPEKAM itu sendiri. Penyelenggara pemerintah kampung akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Kampung menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah Kampung yang di dampingi oleh BAPEKAM. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah Kampung yang lebih baik.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung anggota Badan Permusyawaratan Kampung :

- 1) Anggota BAPEKAM merupakan wakil dari penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah mufakat dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- 2) Jumlah anggota BAPEKAM ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Kampung.
- 3) Kriteria penentuan anggota BAPEKAM ditetapkan dengan jumlah gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, 5 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk 1001 jiwa sampai dengan 1.500 jiwa, 7 orang anggota;
dan
- c. Jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa, 9 orang anggota

4) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah mufakat sebagaimana pada ayat (1) Penghulu membentuk panitia pengisian keanggotaan BAPEKAM dan ditetapkan dengan keputusan Penghulu.

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Kampung

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung fungsi Badan Permusyawaratan Kampung sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung dan Peraturan Kampung bersama Penghulu

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung

3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Penghulu

Sedangkan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 sebagai berikut :

- a. membahas rancangan Peraturan Kampung bersama Penghulu;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan kampung dan Peraturan Penghulu;

- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu;

- d. membentuk panitia pemilihan Penghulu;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. menggali, menampung , menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. mengadakan perubahan Peraturan Kampung bersama Penghulu;
- g. menyusun tata tertib BAPEKAM;
- h. menetapkan calon Penghulu terpilih.

Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Kampung

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung disebutkan Hak Badan Permusyawaratan Kampung antara lain :

- 1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung.
- 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung
- 3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Kemudian pada pasal 6 Anggota Badan Permusyawaratan Kampung berhak

- 1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung
- 2. Mengajukan pertanyaan
- 3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- 4. Memilih dan dipilih
- 4. Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung



2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kemudian kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 7

adalah :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. memproses pemilihan Penghulu
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Kampung
- g. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- h. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
- i. menjaga nama baik institusi BAPEKAM; dan
- j. mematuhi dan melaksanakan sumpah janji pelantikan

Kemudian dalam pasal 8 disebutkan BAPEKAM berkewajiban :

- a. BAPEKAM berkewajiban melaporkan hasil kinerja kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun



- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil kinerja BAPEKAM dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;

J. Pengertian Peran

Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Lain halnya dengan R. Linton berpendapat bahwa, peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. Sementara Menurut Poerwadarminta (1998: 735) menyatakan bahwa: “Peranan adalah segala sesuatu yang menjadi atau yang memegang yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa”²⁹

Berbeda dengan King berpendapat bahwa, peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial. Sementara menurut Palan, peran adalah merujuk pada hal yang harus dijalankan seseorang di dalam sebuah tim.

Hal berbeda dikemukakan oleh Alo Liliweri yang berpendapat bahwa, peran adalah sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi atau kedudukan. Sama halnya dengan Paula J. Christensen & Janet W. Kenney berpendapat bahwa, peran adalah pola perilaku yang ditetapkan saat anggota keluarga berinteraksi dengan anggota lainnya.

²⁹ Heri Kusmanto, *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kemudian pendapat berbeda dikemukakan oleh Donna L. Wong yang berpendapat bahwa, peran adalah kreasi budaya, oleh karena itu budaya menentukan pola perilaku seseorang dalam berbagai posisi sosial. Sementara Sri Saptina H, Dwi Nugroho & Aris Sutardi berpendapat bahwa, peran adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan status yang disandangnya.

K. Pengertian Partisipasi Politik

Definisi menurut Syafi'i Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.”

Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan atau organisasi lainnya, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya sebagai tujuan bersama dan merupakan pemikiran dari beberapa individu bagi kemajuan organisasi yang menaunginya, karena perlu mempunyai tanggungjawab bersama dari setiap tujuan tersebut.³⁰

Menurut Miriam Budiardjo “Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu

³⁰ Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 132



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)”.³¹

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau tindakan-tindakan yang diambil mereka. Sedangkan Pemilih pemula itu sendiri ialah pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden-Wakil Presiden.³²

Menurut Surbakti beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut atau tidak mau ikut dalam proses politik antara lain:

a. Status sosial dan Ekonomi

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 36.

³² Andi Faisal Bakti dkk, *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta: Churia Press, 2012), h. 127.



b. Situasi

Menurut Surbakti, situasi politik juga di pengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi actor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

c. Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

d. Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat di percaya dan dapat di pengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

e. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusidiskusi formal.

Partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, 'public policy'. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, 'voting'; menghadiri rapat umum, 'campaign'; menjadi anggota suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, ‘contacting’ dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.³³

Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal tersebut kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan factor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi. Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelebagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan citacitanya.³⁴

³³ Miriam Budiardjo, *op. cit.*, h. 55.

³⁴ Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015)

h. 55.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) dalam pelaksanaannya untuk menjalankan kehidupan demokrasi di Kampung sudah menjalankan tugasnya walaupun belum maksimal dikarenakan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak dilakukannya sosialisasi maupun pendidikan politik. Namun dengan kegiatan rapat yang membahas politik dan melibatkan masyarakatnya dapat dikatakan Badan Permusyawaratan Kampung atau BAPEKAM telah menjalankan wewenangnya sebagaimana yang disebutkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 tahun 2018 yakni melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung meskipun belum maksimal dimana masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang adanya wewenang dari BAPEKAM dalam hal ini.
2. Faktor penghambat pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung adalah diantaranya; (i) faktor ekonomi (ii) kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan



Kampung (BAPEKAM) dalam menjalankan perannya; (iii) kurangnya kesadaran politik masyarakat.

B. Saran

Untuk bisa terlaksananya Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dalam pelaksanaan perannya Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar memahami peran Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dan terlibat aktif untuk sama-sama bekerja sama agar terciptanya suatu tatanan Pemerintahan Desa yang baik.
2. Perlunya kesadaran politik dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dapat menyebabkan tatanan kehidupan kampung yang tidak lebih baik



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum Cet Ke-1*, Jakarta: Granit, 2004, h. 122.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Andi Faisal Bakti dkk., *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta: Churia Press, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu Cet Ke-1*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Darmawan, Ikhsan, *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015.
- Gaffar, Janedri M., *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- _____, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : UII Press, 2007, h. 61-62.
- Ismatullah, Deddy, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung : CV. Pustaka Media, 2016.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2000.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983
- Ndraha, Talidizuhu, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Rosidin, H. Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung : CV Armico, 2002.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga.

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Witra Wacana Media, 2012.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Surbakti, Ramlan *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT Grasindo, 1992.

Syafie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Syaikani, *Otonomi Daerah Dalam Negar Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Widjaja, HAW., *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Yasir, Rahman, *Gagasan Islam tentang Demokrasi*, Yogyakarta : AKA Group, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perda Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018, Tentang Badan Permusyawaratan Kampung

Perda Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015, Tentang Badan Permusyawaratan Kampung

C. JURNAL :

Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah : Upaya Mengatasi Kegagalan*, Jakarta Selatan: Kata Hasta Pustaka, 2012.

Simamora, Janpatar, *Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Univeritas Gadjah Mada, 2011.

Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Pemilukada dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010

Kusmanto, Heri, *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013.

D.INTERNET :

https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#cite_note-1 diakses pada tanggal 9 Maret 2021



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Peran Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Siak Nomor 17 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung*" yang ditulis oleh :

Nama : **FATIMAH RAHMA NABILA**
 NIM : 11720725264
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Basir, SHL., M.H

Penguji I
Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H

Penguji II
Rudiadi, S.H., M.H

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalikus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kampung Pinang Sebtang Barat dalam Pilkada Siak 2020 Berdasarkan Peraturan Daerah Siak Nomor 17 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung ditulis oleh saudara :

Nama : Fatimah Rahma Nabila
NIM : 11720725264
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Jumat/19 Februari 2021
Narasumber : Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Narasumber

Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

NIK. 130217121

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN TUALANG
KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT

Alamat : Jalan Raya Bunut Km. 2,5 E-mail : psebatangbarat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 005/REKOMENDASI/PSB/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Penghulu Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak memberikan Rekomendasi pada :

Nama : FATIMAH RAHMA NABILA
 NIM : 11720725264
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan judul :

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK DI KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT DALAM PILKADA SIAK 2020 BERDASARKAN PERDA SIAK NO.17 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinang Sebatang Barat, 21 April 2021

**A.n PENGHULU KAMPUNG
 PINANG SEBATANG BARAT
 KERANI**



RIWAYAT HIDUP



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacuan dan menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fatimah Rahma Nabila dilahirkan di Jawa Tengah tepatnya di Pujut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 1998. Anak pertama dari empat bersaudara pasangan dari Muhammad Yani dan Suharyatie. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 007 Tualang di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada tahun 2010.

Juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 01 Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan tamat pada tahun 2013 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2021.

UIN SUSKA RIAU